

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIB PADANG**

EXECUTIVE SUMMERY



OLEH:

SHINDY PUTRI INDRAM I
1810012111283

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No. 20/PID-02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

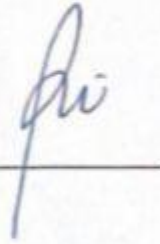
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 20/PID-02/H-2022

Nama : Shindy Putri Indrami
Nomor : 1810012111283
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG

Shindy Putri Indrami¹, Uning Pratimaratri¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: shindy.putriindrami05@gmail.com

ABSTRACT

The penitentiary where the guidance, "Treatment of Offenders" centers on good potential in the individual concerned in the midst of society. Based on Article 14 Paragraph (1) Number 4 of Law No. 12 of 1995 on Correctional Services (Penitentiary Law), formulated inmates are entitled to food health services. Formulation of the problem: (1) How is the fulfillment of the health rights of inmates in the Women's Penitentiary Class IIB Padang? This Research used Socio-legal Approach secondary primary data sources; Document study interview data collection techniques, qualitative analysis observations. Conclusion: (1) The fulfillment of the right to health for female inmates in the Women's Penitentiary (LPP) Class IIB Padang has not been fulfilled

Keywords : Rights, Inmates, Correctional Institutions, Prisoners

PENDAHULUAN

Secara filosofi pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributive (tindakan pembalasan), deterrence (penjeraan), dan juga resosialisasi. Tujuan dari pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi, dan menjadi suatu tindak pidana untuk memberlakukan normanya. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) angka 4 UU

Pemasyarakatan, dirumuskan bahwa narapidana mempunyai hak dalam memperoleh makanan dan tempat tinggal yang layak

Dalam lembaga masyarakat merupakan suatu tatanan perlakuan terhadap narapidana di penjaraberdasarkan pancasila dan asas kemanusiaan yang lebih memerhatikan hak-hak narapidana di penjara terutama narapidana perempuan. Penyiksaan merupakan malapetaka bertentangan dengan hak hidup

dan keberadaan manusia adalah pengingkaran utama dari martabat manusia termasuk narapidana sehingga perlu jaminan untuk penyelenggaraan peradilan yang jujur secara konkrit dengan menggunakan beberapa instrument penting dalam penerapan hak terpidana

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi,

dimana lebih memfokuskan kepada narapidana wanita yang sedang menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dan dimana perbedaan pembinaannya dengan narapidana laki-laki dengan judul skripsi "**PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG**".

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemenuhan hak kesehatan warga binaan di LPP Kelas IIB Padang?
2. Apa kendala yang ditemui dalam pemenuhan hak kesehatan warga binaan di LPP Kelas IIB Padang?

METODE

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan (Bambang Sunggono, 2013:112)
2. Sumber Data
Sumber data terdiri dari primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :
 - a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan informasi, yaitu dengan 2 orang petugas LPP dan 5 orang napi perempuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor di LPP Kelas IIB Padang mengenai data statistik kriminal Narapidana wanita tahun 2020-2021 di LPP Kelas IIB Padang, data kegiatan warga binaan, data prasarana (ruangan) warga binaan

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara memperoleh suatu proses untuk melakukan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan informan. Dan penulis juga melakukan semi terstruktur dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang didapatkan berupa laporan bulandari lembaga pemasyarakatan, laporan tahunan, buku-buku dan melalui sumber lainnya.

4. Analisis data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif dimana upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjanya data, mengorganisasikan data, memilah data untuk bisa dikelola dalam menemukan apa yang penting dan dipelajari untuk dapat memutuskan suatu pengertian atau perspektif subjek dengan memadukan data kepustakaan sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang

Dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan napi perempuan di LPP hampir sama dengan pelaksanaan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan lainnya, yaitu dengan bertujuan untuk menjaga kesehatan sehingga gizi dan protein dalam makanan yang didapat oleh narapidana tetaplah harus diperhatikan, terjadwal oleh petugas yang bertanggung jawab tentang pemenuhan kebutuhan makanan bagi narapidana, pemberian kebutuhan pangan bagi narapidana disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang berasal dari anggaran pusat dan daerah.

Terhadap praktek pemenuhan makanan yang diberikan pada narapidana, maka pemberian menu makanan yang diberikan harus

disesuaikan dengan kebutuhan selayaknya orang-orang pada umumnya, misalkan saja dikota padang rata-rata harga makanan yang dijual dirumah makan mencapai harga Rp.

20.000 (*dua puluh ribu rupiah*) maka hak yang didapatkan oleh narapidana tersebut juga harus setara dengan apa yang seharusnya. Tidak hanya mementingkan soal nilai dari makanan yang diberikan, disamping itu terhadap menu yang diberikan juga menjadi pertimbangan agar diberikan makanan yang memang sesuai dengan kebutuhan, seperti makanan yang bergizi, memiliki protein, memiliki karbohidrat dan hal-hal yang dibutuhkan lainnya sehingga narapidana tetap terjaga kesehatannya saat berada didalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Kendala yang ditemui dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang

Setelah penulis melakukan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang belum memadai dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang masih bergabung dengan Rutan Anak Aia.

KESIMPULAN

1. Pemenuhan terhadap hak kesehatan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan (LPP) Kelas IIB Padang belum semuanya terpenuhi. Adapun bentuk pemenuhannya sebagai berikut :

- Kegiatan-kegiatan kemandirian di LPP seperti bentuk kegiatan pelatihan salon, menjahit, dan kegiatan merajut.
- Kegiatan-kegiatan kepribadian di LPP seperti belajar iqra, belajar sholat, wirid, senam rutin, dan pelatihan kasidah.
- LPP menyediakan jaminan kesehatan bagi narapidana selama menjalankan rehabilitasi sehingga pelayanan pengobatan dan rawatan terhadap narapidana.

2. Kendala yang ditemui dalam pemenuhan hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang

Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang belum memadai, dan tempatnya masih bergabung dengan rutan anak aia. Selain itu fasilitas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas..IIB Padang

cukup baik, tetapi kebersihan air di Lembaga Pemasarakatan Perempuan masih belum termasuk kriteria. sehingga belum dapat dikatakan air tersebut mutu dan kualitas yang baik atau layak digunakan. Akan tetapi untuk kebutuhan minum warga binaan di LPP Kelas IIB Padang menggunakan air galon isi ulang yang dibeli dari depot air minum.

Narapidana mengeluhkan tentang kekurangan air terutama untuk digunakan sebagai kebutuhan mandi, dan kebersihan lainnya, narapidana harus melakukannya sendiri seperti mengangkat kamar mandi dari luar ruangan karena terbatasnya kran air di lapas. Dengan demikian banyaknya narapidana mengalami penyakit kulit seperti gatal-gatal, penyakit disebut dikatakan penyakit yang sering terjadi di LPP Kelas IIB Padang.

SARAN

1. Sebaiknya Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Barat dapat segera merealisasikan lokasi khusus terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.
2. LPP Meningkatkan Prasarana untuk penyediaan air bersih untuk kepentingan mandi, mencuci di LPP. Mengingat, kualitas air di LPP tidak memenuhi syarat untuk kesehatan.
3. LPP Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana, dengan cara menyediakan klinik khusus bagi narapidana perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah banyak mendapatkan saran, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan selesainya artikel ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak **Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.HUM** selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktu dan membantu dalam menyelesaikan executive summary ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Buku

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*,

PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 112